



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 30 /KEP/HK/2026

TENTANG  
TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN : ...



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.  
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur  
KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.  
KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.  
KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 ~~Februari~~ 2026  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd


FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiadi Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 30 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
1	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan pembagian tugas bagi seluruh Tim Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada rapat pembahasan/asistensi anggaran TAPD; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; d. mengawasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan e. melakukan koordinasi dengan pihak eksternal pemerintah, baik swasta, BUMN/BUMD, Perbankan, Perguruan Tinggi maupun pihak-pihak lainnya dalam rangka kerjasama, percepatan dan efisiensi pelaksanaan PBJ.	Seluruh Perangkat Daerah dan seluruh Kabupaten/Kota



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
2	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan dan pengelolaan PBJ baik strategis maupun non strategis;	Perangkat Daerah Prov. NTT:  1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2) Dinas Peternakan 3) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT 4) Dinas Perhubungan 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6) Badan Pengelola Perbatasan 7) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 8) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 9) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 10) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 11) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTT 12) Biro Hukum 13) Badan Kesbangpol 14) Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
3	Arabinaya L.L. Lamba,S.Pt,M.M/Fungsional Pengelola PBJ Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	b. melaksanakan Koordinasi dan mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran Murni/Pergeseran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	
4	Sofi J. Messakh, S.E/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan koordinasi pelaksanaan pemaketan penginputan sampai pengumuman serta monitoring dan evaluasi terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak;	
5	Mardiosy E. Rihi Ratu,S.H/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait data progres pengadaan baik tender maupun non tender serta pelaksanaan dan penelaahan e-purchasing ( <i>e-contract</i> , <i>e-tendering</i> , toko daring dan e-katalog) serta memfasilitasi pemanfaatan sistim pengadaan (SIRUP, <i>e-contract</i> , <i>e-tendering</i> , toko daring dan e-katalog);	
6	Yustin Elvry Toka, S.T/Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pemenuhan kebutuhan MCSP;	
7	Patrisia Y. Djami, S.T/Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	f. memfasilitasi pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ	
8	Susana Irene H. Lukas ST,M.SI/Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.	Anggota		



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
9	Lucius W. Luly, S.STP, M.A/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	g. memfasilitasi pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;	Kabupaten/Kota:  1. Kota Kupang 2. Kabupaten Sikka 3. Kabupaten Manggarai Barat 4. Kabupaten Rote Ndao 5. Kabupaten Sumba Barat Daya 6. Kabupaten Belu 7. Kabupaten Ngada
10	Denvinoputra E. Habid, BA. (HONS)/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	h. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;	
11	Anggelina Regina Sudi,S.Th/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	i. memfasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja serta melakukan optimalisasi publikasi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah;	
12	Muhamad Yoga Nurpratama,S.AP/ Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	j. memfasilitasi pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah;	
13	DR.Frans Budiman Johannes,S.Sos, M.Si/Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	k. memfasilitasi pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.	
14	James Pradita Nenobais,SSTP,M.M/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	l. memfasilitasi Laporan mengenai proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. NTT	
15	Zet Amnifu, S.T/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	m. memfasilitasi penilaian kinerja penyedia; dan n. membuat hasil laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa terhadap seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
16	Maglon Teuf, S.Kom/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
17	Septian Maradona Tanamal/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
18	Jacobis Fardinan Zacharias/Pengadministrasi Perkantoran pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
19	Gregorius Xaverius H.Leu Ehaq/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
20	Herlince Pollo/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
21	Semuel S. A. E. Toelle/Pengadministrasi Perkantoran pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
22	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan dan pengelolaan PBJ baik strategis maupun non strategis proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. NTT	Perangkat Daerah Prov. NTT:  1) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan PA 2) Dinas Koperasi Dan UKM 3) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 4) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 5) Dinas Komunikasi Dan Informatika 6) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 7) Biro Pemerintahan 8) Biro Umum 9) Dinas Pariwisata Dan Ekraf 10) Dinas Sosial 11) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 12) Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr W Z Johannes Kupang 13) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT 14) Satuan Polisi Pamong
23	Leonardo A. Z. R. Langoday, S.Kom/Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	b. melaksanakan Koordinasi dan mengikuti Rapat Pembahasan AnggaranMurni/Pergeseran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	
24	Octovianus Gollu Tena, S.T/Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan koordinasi pelaksanaan pemaketan penginputan sampai pengumuman serta monitoring dan evaluasi terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak;	
25	Aries Sudharmono, S.Pt/Fungsional Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait data progres pengadaan baik tender maupun non tender serta pelaksanaan dan penelaahan e-purchasing ( <i>e-contract</i> , <i>e-tendering</i> , toko daring dan <i>e-katalog</i> ) serta memfasilitasi pemanfaatan sistim pengadaan (SIRUP, <i>e-contract</i> , <i>e-tendering</i> , toko daring dan <i>e-katalog</i> );	
26	Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak/Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pemenuhan kebutuhan MCSP;	
27	Riky D. Rihi Pake, S.Farm.Apt/Fungsional Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
28	Boby L. Da Costa, S.Kom/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	f. memfasilitasi pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ	Praja  Kabupaten/Kota:  1. Kabupaten Kupang 2. Kabupaten Lembata 3. Kabupaten Alor 4. Kabupaten Sumba Timur 5. Kabupaten TTU 6. Kabupaten Ende 7. Kabupaten Manggarai
29	Rivantius Foyh, S.Kom/Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	g. memfasilitasi pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;	
30	Petrus Lemba, S.E/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	h. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;	
31	Alexandro Benigno Lake,S.T/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	i. memfasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja serta melakukan optimalisasi publikasi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah;	
32	Thobias R. Foenale, S.E/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	j. memfasilitasi pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah;	
33	Mega Olyvia Clarita Manu, S.AB/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	k. memfasilitasi pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. l. memfasilitasi Laporan mengenai proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. NTT m. memfasilitasi penilaian kinerja penyedia; dan n. membuat hasil laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa terhadap seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
34	Dominika Odelberta G. Pawe, SE,M.M/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
35	Indri Mayasari Susetyo, S.T/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
36	Ernys Susana Setiawaty Djokaho, S.Hut/Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
37	Emiliana Fatima Manek, S.S/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
38	Dian Andini Putri, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
39	Magdalena Mensiana, S.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
40	Serlien Indriyani Manafe, A.Md/ Arsiparis Terampil pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
41	Julita Marleni Laning,A.Md/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
42	Rofinus Raja Weking/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
43	Emirensiana Sonia C. K. Ola, S.E/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
44	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan dan pengelolaan PBJ baik strategis maupun non strategis; b. melaksanakan Koordinasi dan mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran Murni/ Pergeseran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	Perangkat Daerah Prov. NTT: 1. Badan Keuangan Daerah 2. Dinas Kelautan Dan Perikanan 3. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
45	Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
46	Dance M. B Pidson, S.E/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan koordinasi pelaksanaan pemaketan penginputan sampai pengumuman serta monitoring dan evaluasi terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait data progres pengadaan baik tender maupun non tender serta pelaksanaan dan penelaahan <i>e-purchasing</i> ( <i>e-contract</i> , <i>e-tendering</i> , toko daring dan e-katalog) serta memfasilitasi pemanfaatan sistim pengadaan (SIRUP, <i>e-contract</i> , <i>e-tendering</i> , toko daring dan e-katalog); e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pemenuhan kebutuhan MCSP; f. memfasilitasi pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ g. memfasilitasi pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; h. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;	4. Biro Organisasi 5. Badan Penghubung 6. Dinas Kesehatan 7. Badan Pendapatan Dan Aset Daerah 8. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 9. Badan Pendapatan Dan Riset Daerah 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Biro Pemerintahan 12. Inspektorat Daerah 13. Biro Administrasi Pimpinan 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten/Kota: 1. Kabupaten TTS 2. Kabupaten Malaka 3. Kabupaten Flores Timur 4. Kabupaten Sabu Raijua
47	Ignasio Octovian Moda Geju, S.Ak/Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
48	Hubertus Haji, S.E/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
49	Michael Sogan Kelen, A.Md/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
50	Anwar Harijana, S.Si/Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
51	Hanok Melkianus Manesi, S.H/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
52	Samuel Arie Parera, S.T/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
53	Godehardus S. D. Hatul, S.E/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	i. memfasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja serta melakukan optimalisasi publikasi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah;	5. Kabupaten Manggarai Timur 6. Kabupaten Sumba Barat 7. Kabupaten Sumba Tengah 8. Kabupaten Nagekeo
54	Romanus Leur,S.T/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	j. memfasilitasi pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah;	
55	Rufaida Ema Wokan, S. Ak/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	k. memfasilitasi pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.	
56	Aurick Ardy Firdaus Sigit, S.Ds,ACA/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	l. memfasilitasi Laporan mengenai proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. NTT	
57	Saul David Mudak, ST,M.AP/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	m. memfasilitasi penilaian kinerja penyedia; dan	
58	Felicia Nurkrisinta Kintari, S.T/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	n. membuat hasil laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa terhadap seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	
59	Kollo Thalib, S.P/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
60	Ignatius Origenes Bewat,S.M/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
61	Arisanti Meliani,S.E/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
62	Sara Juni Ulandari Gultom/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
63	Harry Tambunan,S.E/Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
64	Julia Paulin Nola Mole,S.M/Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
65	Yulianti Rosiana Pandie/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		




NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
66	Junita Agustin Lepez, S.T/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
67	Yesi Mehelina Amelia Mabilehi, S.E/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001